



---

# Laporan Keanggotaan Sea Delight, LLC dalam Seafood Savers

---

Ringkasan perkembangan perbaikan  
Ikan Karang, Pancing Ulur/Rawai Dasar  
Banggai, Sulawesi Tengah  
Juli 2015- Desember 2015

---



Muhammad Maskur Tamanyira – Seafood Savers  
Officer





---





## Informasi Umum





- Lokasi** : Banggai, meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah  
Survey pertama : Oktober 2010  
Jumlah petambak/nelayan : Total keseluruhan nelayan adalah 208, dengan jumlah pengepul 5 orang yang tersebar di seluruh area Banggai (2013)
- Praktik Penangkapan**
  - Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : 4 – 6 Ons
  - Metode penangkapan : Pancing Ulur dan atau Rawai Dasar, dengan armada tangkap 1-3 GT
  - Kisaran harga beli di nelayan : Rp. 10.000 – 16.000/ Kg (2013)

Jenis Ikan target adalah sebagai berikut :

<b>Nama Asing</b>	<b>Nama Ilmiah</b>	<b>Gambar Panduan KKP</b>	<b>Fishery Improvement Project Code (FIPC)</b>
<b>Malabar Snapper</b>	<b><i>Lutjanus malabaricus</i></b>		<b>A</b>
<b>Crimson Snapper</b>	<b><i>Lutjanus altifrontalis</i></b>		<b>B</b>

<p><b>John Snapper</b></p>	<p><i>Lutjanus johni</i></p>		<p><b>C</b></p>
<p><b>Lehi Snapper</b></p>	<p><i>Aphareus rutilans</i></p>		<p><b>D</b></p>
<p><b>Uku Snapper</b></p>	<p><i>Aprion virescens</i></p>		<p><b>E</b></p>
<p><b>Opakpaka</b></p>	<p><i>Pristipomoides filamentosus</i></p>		<p><b>F</b></p>

<p><b>Onaga</b></p>	<p><i><b>Etelis coruscans</b></i></p>		<p><b>G</b></p>
<p><b>Hachijo</b></p>	<p><i><b>Etelis carbunculus</b></i></p>		<p><b>H</b></p>
<p><b>Orange-spotted Grouper</b></p>	<p><i><b>Epinephelus coioides</b></i></p>		<p><b>I</b></p>
<p><b>Six Bar Grouper</b></p>	<p><i><b>Epinephelus sexfaciatus</b></i></p>		<p><b>J</b></p>

<p><b>Greasy Grouper</b></p>	<p><i>Epinephelus tauvina</i></p>		<p><b>K</b></p>
<p><b>Long Nosed Emperor</b></p>	<p><i>Lethrinus olivaceus</i></p>		<p><b>L</b></p>
<p><b>Spangled Emperor</b></p>	<p><i>Lethrinus nebulosus</i></p>		<p><b>M</b></p>
<p><b>Purple Headed Emperor</b></p>	<p><i>Lethrinus lentjan</i></p>		<p><b>N</b></p>

**3. Kapasitas produksi**

Total produksi untuk tahun 2015 belum diketahui

**4. Keterangan tambahan**

Rincian evaluasi keanggotaan (nama perusahaan) berdasarkan *Fisheries Improvement Project (FIP)* yang telah dilaksanakan:

AKSI/TUGAS	OUTPUT	AKSI DETAIL (Bagi anggota Seafood Savers)	ACTION LEAD & PARTNERS	Tahapan SEAFOOD SAVERS		HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
				INTERMEDIATE	ADVANCE		
<b>1. TATA KELOLA DAN DEFINISI DARI OBJEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN NASIONAL</b>							
1.1. Memperjelas objektif untuk memastikan bahwa prioritas diberikan pada perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan berbasis lestari pada	Mekanisme untuk memperluas hukum pada saat ini untuk memprioritaskan keberlanjutan dari perikanan, ketimbang objektif produksi dan perumbuhan, dan mengakomodasi prinsip PAFM dan EAFM	1.1.1. Memfasilitasi proses perkembangan dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSDI, Instansi Perikanan		6 bln	WWF mendorong learning center EAFM di Sulawesi tengah, STPL palu untuk melakukan sosialisasi penilaian indikator EAFM untuk melakukan penilaian performa pengelolaan perikanan di kawasan banggai dan sekitarnya	Penilaian EAFM akan dilakukan di periode selanjutnya, dan perusahaan diharapkan dapat mendukung kebutuhan data dari STPL Palu

tingkat kabupaten dan provinsi

				Didukung oleh STPL Palu, WWF-ID menyampaikan hasil penilaian indikator EAFM di Luwuk - Banggai. Hasil tersebut diupayakan untuk didorong untuk menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan perikanan di kawasan Luwuk - Banggai	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang, serta tidak sungkan untuk berbagi informasi terkait data penangkapan dan hal lainnya yang terkait untuk mendukung <i>good governance</i>
1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan			6 bln	Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Penilaian EAFM belum dilaksanakan



1.2. Perpanjangan dari system pengelolaan pada tingkat lokal	Mengoptimisasi adaptasi regulasi dan implementasi pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (regulasi lokal, kepercayaan lokal, dll), tinjauan dari ahli hukum untuk menilai mekanisme terbaik untuk implementasi regulasi pada hukum di tingkat provinsi/kabupaten sampai nasional (Hukum 31/2004 dan 32/2004).	1.2.1 Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai intepertasi dari peraturan kementerian terkait rencana pengelolaan yang mencakup Harvest Control Rule	SDI, P4KSDI, Dinas, PLN, KKJI, PSDKP		60 bln	Belum dilaksanakan	Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya
		1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur pada rencana pengelolaan perikanan Provinsi/kabupaten sebagai patron dari perkembangan dan implementasi di area tersebut. Rencana tersebut harus memiliki harvest control rule yang mencakup prinsip perikanan berkelanjutan			12 bln	Belum dilaksanakan	Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya

		contoh: ukuran tangkap minimum, menyesuaikan jumlah usaha dengan kapasitas stok					
		1.2.3. Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai perpanjangan dari regulasi EAFM dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan				Didukung oleh STPL Palu, WWF-ID menyampaikan hasil penilaian indikator EAFM di Luwuk - Banggai. Hasil tersebut diupayakan untuk didorong untuk menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan perikanan di kawasan Luwuk - Banggai	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang, serta tidak sungkan untuk berbagi informasi terkait data penangkapan dan hal lainnya yang terkait untuk mendukung <i>good governance</i>
		1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur di guideline EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung				Didukung oleh STPL Palu, WWF-ID menyampaikan hasil penilaian indikator EAFM di Luwuk - Banggai. Hasil tersebut diupayakan untuk didorong	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang, serta tidak sungkan untuk

		prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan sebagai patron dari pengembangan dan implementasi dari EAFM di tingkat Provinsi/Kabupaten				untuk menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan perikanan di kawasan Luwuk - Banggai	berbagi informasi terkait data penangkapan dan hal lainnya yang terkait untuk mendukung <i>good governance</i>
1.3. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan spesifik (Rencana Pengelolaan Perikanan)	Mengadopsi dan memasukan parameter keberlanjutan (contoh: Risk Based assessment, EAFM, pendekatan pencegahan) pada rencana manajemen perikanan	1.3.1 Pengembangan dan pengadopsian prinsip rencana pengelolaan ikan karang pada area tersebut	SDI, Instansi Perikanan, Universitas Hasanudin di Makassar		12 bln	Belum dilaksanakan	Upaya penyusunan RPP untuk ikan karang belum diinisiasi di tingkat Kabupaten dan tau Nasional
		1.3.2 Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan (contoh: Menyediakan surat mengenai rencana pengelolaan, secara aktif menghadiri pertemuan			6 bln	Belum dilaksanakan	Upaya penyusunan RPP untuk ikan karang belum diinisiasi di tingkat Kabupaten dan tau Nasional

		apabila diwajibkan)					
1.4. Pengembangan <i>Territorial User Rights for Fisheries</i>	Lokakarya tentang pengenalan TURF sebagai salah satu alat penting dalam pengelolaan perikanan dan pengimplementasian TURF yang diperkuat oleh kerangka legal	1.4.1 Menginisiasi lokakarya TURF (atau langkah RBM lain) yang juga mengidentifikasikan langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan mekanisme	SDI, Instansi Perikanan, Kelompok nelayan, Organisasi Lingkungan (TNC/WWF), Universitas Hasanudin di Makassar	6 bln		Memperkenalkan alat SPOT Tracker untuk menandai lokasi penangkapan ikan para nelayan di 3 lokasi pilot meliputi: Pagimana, Pangkalaseang dan Banggai Laut	Sea Delight akan nelayan penguji dari 3 alat spotracker yang disediakan
		1.4.2 Mengimplementasikan TURF (atau langkah RBM lain) untuk mengelola perikanan		24 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kriteria baku untuk TURF (masih dikembangkan)
		1.4.3 Perusahaan memfasilitasi implementasi mekanisme TURF (atau langkah RBM lain)					
1.5. Menggambarkan zona no take	Mengoptimalkan pengelolaan MPA berbasis prinsip ilmiah (termasuk minimal 10-30% no take zone dari total area karang)	1.5.1 Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan marine no take	KKJI, Instansi Perikanan, Kelompok nelayan, Organisasi Lingkungan (TNC/WWF),	6 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan

		zone system baru atau yang sudah ada					yang menjual untuk CV Indotropic Fishery
		1.5.2 Menentukan no take zone dan peraturan terkait untuk mendukung perikanan		6 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan yang menjual untuk CV Indotropic Fishery
		1.5.3 Mengimplementasikan hasil penggambaran dona tersebut		18 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan yang menjual untuk CV Indotropic Fishery
<b>2. MEMPERKUAT KERANGKA INSTITUSIONAL</b>							
2.1. Memperbaiki struktur dari system pengelolaan perikanan	Mengembangkan objektif nasional, Sub FKPPS memfasilitasi adopsi dari HCRs,	2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan dari peraturan (cth: peraturan kementerian) yang mendukung FKPPS dan/atau otoritas	SDI, Instansi KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan (WWF/TNC), Pemangku		18 bln	Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

	pengelolaan nasional (cth: satuan tugas) agar bertanggungjawab atas pengelolaan perikanan ikan karang	kepentingan sebagaimana dijelaskan				
	2.1.2 Secara aktif melibatkan industry, instansi penelitian, dan LSM di pertemuan terkait pengambilan keputusan perikanan			18 bln	Sea Delight berpartisipasi dalam penyusunan kajian analisa HCR dan HS untuk ikan karang di Luwuk banggai yang disampaikan dalam Seminar Nasional Perikanan Karang Indonesia November 2015	Sea Delight menerapkan/ membangun langkah taktis guna merespon pemantauan tahunan perbaikan perikanan tuna (FIP) untuk diterapkan di Luwuk - Banggai
	2.1.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat pada proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi/kabupaten dan nasional (cth: menghadiri pertemuan)			60 bln	Sea Delight dan Indotropic Fishery berpartisipasi dalam penilaian perbaikan perikanan karang berdasarkan standar MSC di WPP 713. Yang dilaksanakan februari 2014	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang
	2.1.4 Memonitor dan evaluasi kinerja dari					FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada

		otoritas pengelolaan Provinsi/Kabupaten yang dilakukan oleh agen internal dan eksternal dari KKP dari Provinsi/Kabupaten yang bertanggungjawab untuk pengelolaan perikanan ikan karang					keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
2.2. Mengidentifikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kapasitas keseluruhan badan pelaksana	Tugas yang didefinisikan untuk semua pemangku kepentingan, Satker Perikanan Ikan Karang, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta Komunitas	2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (peraturan kementerian, peraturan direktorat jendral, dll) mengenai alokasi deskripsi pekerjaan kepada agen yang tepat untuk mendukung pengelolaan perikanan	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, komunitas, pemangku kepentingan, Organisasi Lingkungan		24 bln	Belum dilaksanakan	Belum ada ketentuan yang jelas terkait regulasi dalam monitoring dan evaluasi terkait performa pengelola perikanan Propinsi/ Kabupatm

### 3. AKTIVITAS PENELITIAN

3.1. Memperkuat kapasitas manusia dan institusional untuk stock assessment di Indonesia	Mengembangkan system kerjasama di industry, instansi penelitian, universitas, NGO dan instansi perikanan untuk melaksanakan stock assessment untuk perikanan kakap dan kerapu	3.1.1 Workshop mengenai <i>stock assessment</i> ; meliputi methodology dan analisis pengumpulan data, dan rencana sinkronisasi	P4KSI, BPPL dan Universitas Hasanudin Makassar	6 bln		Sea Delight bersepakat untuk melakukan pengumpulan data dan akan meminta CV. Indotropic untuk bersedia membantu aktivitas	Tidak tersedianya pernyataan resmi melalui surat atau surat keputusan
		3.1.2 Pelatihan mengenai <i>stock assessment</i> , biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya panduan melakukan stock assessment
		3.1.3 Mengembangkan kebijakan perusahaan terkait komitmen untuk mendukung pengumpulan data untuk <i>stock assessment</i> dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya panduan melakukan stock assessment



		produksi (logbook, wawancara, sample gonad, dll)					
3.2. Tinjauan ilmiah	Informasi mengenai indicator dari status stok ikan karang tersedia (informasi biologis ikan, dll)	3.2.1 Melakukan tinjauan ilmiah pada indicator stok ikan karang	P4KSI, BPPL dan Universitas Lokal	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum mengidentifikasi rekanan universitas dana tau peneliti untuk review ilmiah stok di Banggai
3.3. Risk assessment	Melaksanakan TOT pada BRPL untuk Risk Assessment, untuk stock assessment kakap dan kerapu melibatkan manajer dan peneliti perikanan	3.3.1 Workshop pelatihan mengenai <i>risk assessment</i> , termasuk simulasi	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengepul, Proessor	3 bln		Belum dilaksanakan	Kegiatan masih sebatas pematangan konsep internal di WWF Indonesia untuk didorongkan kepada pihak-pihak terkait
		3.3.2 Melaksanakan <i>Risk Based Assessment</i>		3 bln		Belum dilaksanakan	Kegiatan masih sebatas pematangan konsep internal di WWF Indonesia untuk didorongkan kepada pihak-pihak terkait
3.4. Kelimpahan stok dan <i>stock assessment</i>	Melaksanakan studi mengenai limit reference points berdasarkan ukuran ikan, yang melibatkan industry	3.4.1 Studi mengenai LRP untuk Kerapu dan Kakap	P4KSI/BPPL, Universitas di Makassar	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya kajian mengenai LRP untuk jenis grouper dan snapper

	untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan	3.4.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)		3 bln		Sea Delight melanjutkan pencatatan ikan dengan konsversi nota beli produk dari pengepul	Terus melakukan pencatatan nota pembelian
3.5. Komposisi armada	Mengembangkan strategi/regulasi untuk mengimplementasikan reduksi usaha penangkapan	3.5.1 P4KSI dan universitas lokal akan melaksanakan studi mengenai usaha terbaik yang diperbolehkan pada perikanan dan solusi untuk mengurangi usaha	DKP Provinsi dan Kabupaten	6 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan
		3.5.2 Pemerintah lokal akan mengembangkan peraturan dan memfasilitasi implementasi untuk mengurangi usaha		6 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan

		3.5.3 Perusahaan berpartisipasi dalam implementasi peraturan pada rantai suplai				Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan
3.6. Produktifitas stok	Melaksanakan studi mengenai produktifitas stok	3.6.1 Workshop ke pemangku kepentingan lain mengenai pengumpulan data	P4KSI, BPPL, SDI, Universitas, Industri (langsung dari haji dan perusahaan pembeli)	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada dasar pengumpulan data untuk produktifitas stok
		3.6.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)		3 bln		Bersama dengan Enviromental Defense Fund, menginisiasi pengumpul data biologi ikan meliputi jenis kelamin, panjang dan berat	Pengumpulan data dikumpulkan selama 1 tahun penuh untuk melihat kemungkinan melakukan analisa ukuran layak tangkap
		3.6.3 P4KSI melaksanakan analisis dan pelaporan data		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada dasar pengumpulan data untuk produktifitas stok

3.7. Pengumpulan data bycatch	Mengembangkan program observer untuk spesies non-target (retained species, ETP, dan habitat) dari rawai dasar dan pancing ulur	3.7.1 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data bycatch (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	SDI, KKJI, P4KSI, Universitas, PLN, KAPI, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten	6 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan
		3.7.2 Pelatihan observers/enumerator		3 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan
		3.7.3 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk <i>stock assessment</i> dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan memberikan akses kepada observer/enumerator untuk bekerja di kapal penangkap dan pengumpul ikan, yang juga melibatkan		6 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan

		universitas lokal dan komunitas					
3.8. Pemetaan bawah air	System monitoring habitat telah dikembangkan dan dilaksanakan setiap tahun	3.8.1 Metodologi untuk system monitoring habitat telah diidentifikasi dan pelatihan dilaksanakan	KKJI, NGO, Universitas, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Prose ssor	3 bln		Didukung oleh STPL Palu, dilakukan penilaian habitat dan ekosistem melalui pendekatan penginderaan jauh. Informasi ini dapat digunakan untuk bahan guna mendukung hasil penilaian indikator EAFM guna menyusunn rencana pengelolaan perikanan bertanggungjawab	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang, serta tidak sungkan untuk berbagi informasi terkait data penangkapan dan hal lainnya yang terkait untuk mendukung <i>good governance</i>
		3.8.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk monitoring habitat		60 bln		Didukung oleh STPL Palu, dilakukan penilaian habitat dan ekosistem melalui pendekatan penginderaan jauh. Informasi ini dapat digunakan untuk bahan guna mendukung hasil penilaian indikator EAFM guna	Diharapkan Sea Delight dan Indotropic fishery terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis guna pengembangan kapasitas bersama seluruh pihak yang bekerja untuk perbaikan perikanan karang, serta tidak sungkan untuk berbagi informasi terkait data penangkapan dan hal lainnya

						menyusun rencana pengelolaan perikanan bertanggungjawab	yang terkait untuk mendukung <i>good governance</i>
3.9. Modelling ekosistem	Kompilasi studi mengenai dampak dari perikanan pancing ulur dan rawai dasar pada ekosistem	3.9.1 Universitas lokal melaksanakan studi terkait	BPPL, Universitas Hasanudin di Makassar	6 bln		Belum dilaksanakan	Metode dan konsep belum ditetapkan
3.10. Peer review dari keefektifan program penelitian		3.10.1 Melaksanakan tinjauan assessment	Independent reviewer	3 bln		Belum dilaksanakan	Metode dan konsep belum ditetapkan
<b>4. PENGUATAN KEPATUHAN</b>							
4.1. Mendefinisikan peran dari POKMASWAS dan menentukan aksi	Memperkuat POKMASWAS (kelompok pengawas komunitas	4.1.1 Memfasilitasi pembentukan dari PokMasWas, mempersiapkan pengawasan dan rencana monitoring praktik penangkapan ikan (termasuk institutional dan capacity building)	PSDP, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten / POKMASWAS		3 bln	Bekerjasama dengan Universitas Tadulako untuk membangun kelompok nelayan selaku cikal bakal Pokmaswas di Pagimana, Pangkalaseang, dan Banggai Laut	Sea Delight memonitor perkembangan kelompok nelayan

		4.1.2 Monitor kinerja dari PokMasWas sebagai bagian dari system pengelolaan			3 bln	Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.1.3 Perusaha mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan pengoperasian PokMasWas			3 bln	Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi	pelanggaran yang sudah ada untuk diperhitungkan dalam proses langkah pengelolaan pada perikanan (EEZ, archipelagic dan coastal)	4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	PSDP/Departemen Legal KKP		3 bln	Belum dilaksanakan	Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini di Kabupaten ataupun Provinsi
		4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sanksi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang			6 bln	Belum dilaksanakan	Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini di Kabupaten ataupun Provinsi

		4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi			60 bln		Belum dilaksanakan	Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini di Kabupaten ataupun Provinsi
4.3. Penjangkauan melalui edukasi	Diperluas ke jaringan POKMASWAS. Membutuhkan pembelian yang cukup dari pengepul dan pengolah.	4.3.1 Memfasilitasi pelatihan mengenai pengawasan kepada PokMasWas dan PSDP di tingkat Provinsi dan Kabupaten	DKP District, BPPL, WWF dan prosesor		6 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.3.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan lain untuk memperbaiki penegakan dan pengawasan			3 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.3.4 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang mendukung penegakan			3 bln		BMP perikanan karang dari WWF- Indonesia dilatihkan dengan dukungan dari Sea Delight dan	Diharapkan ada pemantauan rutin di masing-masing lokasi mengenai penerapan BMP di lapangan



		petugas yang bekerja di lapangan				Universitas tadulako di Pagimana. Untuk selanjutnya akan dilatihkan oleh staf Sea Delight di lokasi lainnya di Banggai dan sekitarnya	
4.4. Laporan dipersiapkan dan dapat di akses publik, mengidentifikasi pelanggaran yang terdeteksi	Laporan telah dipersiapkan dan mengidentifikasi hasil aktifitas inspeksi, terutama terkait aktifitas penangkapan ikan	4.4.1 Memfasilitas pengumpulan dari laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten	60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP		60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan terkait pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan mengenai pelanggaran peraturan		60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

## 5. ISU LAIN

5.1. Tinjauan dampak dari subsidi bahan bakar pada keberlanjutan kapal 5-30GT; dan < 5 GT.	Melaksanakn tinjauan mengenai dampak dari subsidi dari sumberdaya perikanan pada seluruh perikanan (ramah lingkungan dan non-ramah lingkungan) dan variasi GT yang berbeda	Telah terlibat di dalam studi mengenai kesempatan dan tantangan dari subsidi perikanan di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan	PDN, PLN, BBRSE		24 bln		Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID
		Terlibat dalam studi subsidi perikanan			24 bln	Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID